

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada kota kota besar di DKI Jakarta misalnya, sampah merupakan masalah tersendiri karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Setiap hari ribuan orang menghasilkan sampah, membuat kehidupan manusia tidak pernah aman dari sampah. Dengan bertambahnya populasi dan aktivitas penduduk, jumlah sampah yang dihasilkan juga terus meningkat.

Di DKI Jakarta pengolahan sampah umumnya tidak dilakukan dengan cara yang berkesinambungan, hal ini menyebabkan kondisi yang mengkhawatirkan di TPA atau tempat pembuangan akhir Bantargebang di Bekasi, yang merupakan lokasi pengelolaan sampah untuk DKI Jakarta, serta terjadinya pembuangan sampah secara *open dumping* atau terbuka (Mulyadin, Iqbal, & Ariawan, 2018:180). Menurut Winahyu, et.al., (2019:3) metode pembuangan terbuka atau yang biasa disebut *open dumping* adalah metode paling dasar dimana pembuangan sampah dilakukan ke tempat pembuangan akhir tanpa pemrosesan lebih lanjut, sementara metode *landfill* melibatkan pemadatan sampah, kompresi menggunakan peralatan berat, dan penutupan dengan tanah. Untuk menampung timbulan sampah yang kian meningkat seiring dengan populasi, sistem pembuangan sampah terbuka membutuhkan lahan TPA yang sangat luas sehingga sistem ini tidak berkelanjutan.

Bersumber data yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) produksi sampah di DKI Jakarta setiap tahunnya terus meningkat. Sepanjang tahun 2023, DKI Jakarta menghasilkan 3,14 juta ton limbah menjadi yang tertinggi keempat di Indonesia dengan Jawa Tengah berada di posisi pertama mencapai 5,8 juta ton, Jawa Timur mencapai 5 juta ton, dan disusul dengan Jawa Barat yang mencapai 4,9 juta ton. Jumlah timbulan sampah di DKI Jakarta tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2022, lalu pada 2024 terjadi kenaikan menjadi 3,17 juta ton, dan pada tahun 2025 mencapai 3,35 juta ton dan menjadi angka tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Berikut merupakan jumlah timbulan sampah dalam empat tahun terakhir di DKI Jakarta.

Tabel 1. 1

Jumlah Timbulan Sampah Tahunan di Provinsi DKI Jakarta

Provinsi	Tahun	Jumlah Timbulan Tahunan (Ton)
DKI Jakarta	2022	2.612.901
DKI Jakarta	2023	3.141.648
DKI Jakarta	2024	3.171.248
DKI Jakarta	2025	3.351.057

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, (telah diolah kembali)

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, terdapat peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan di DKI Jakarta dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 mencapai 2,61 juta ton, di 2023 mencapai 3,14 juta ton, lalu pada tahun 2024 mencapai 3,17 juta ton dan di tahun 2025 mencapai 3,35 juta ton.

Tabel 1. 2

Jumlah penduduk di DKI Jakarta

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)	
	2024	2025
Kep. Seribu	28.809	29.088
Jakarta Timur	3.086.010	3.085.058
Jakarta Selatan	2.230.653	2.219.225
Jakarta Barat	2.479.571	2.487.199
Jakarta Pusat	1.044.297	1.038.396
Jakarta Utara	1.815.606	1.819.009
DKI Jakarta	10.684.946	10.677.975

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta juga terlihat bahwa populasi pada tahun 2024-2025 di DKI Jakarta mencapai 10,6 juta jiwa. Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi sehingga hal ini berdampak pula pada sampah yang dihasilkan.

Selain itu, pada tahun 2024, rata-rata kepadatan penduduk di DKI Jakarta mencapai 16.165 jiwa per kilometer persegi. Angka ini telah meningkat

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 16.146 jiwa/km² pada 2023 dan 15.979 jiwa/km² pada 2020. Tingginya kepadatan ini mencerminkan konsentrasi penduduk yang sangat padat, terutama di wilayah kota-kota administratif. Dengan kepadatan penduduk di DKI Jakarta hal ini menimbulkan banyaknya produksi sampah yang dihasilkan. Berikut merupakan tabel kepadatan penduduk di DKI Jakarta.

Tabel 1. 3

Jumlah Kepadatan Penduduk di DKI Jakarta

Kab/Kota	Kepadatan Penduduk per km		
	2020	2023	2024
Kep. Seribu	2.587	2.659	2.686
Jakarta Selatan	15.363	15.424	15.390
Jakarta Timur	16.369	16.598	16.633
Jakarta Pusat	22.220	22.061	21.955
Jakarta Barat	19.476	19.760	19.837
Jakarta Utara	12.084	12.288	12.333
DKI Jakarta	15.979	16.146	16.165

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pengelolaan sampah yang tidak baik memiliki dampak pada lingkungan seperti lingkungan menjadi kotor, tidak enak dipandang, menjadi penyebab berbagai penyakit, selain itu juga sampah yang dibuang ke badan air atau ke sungai dapat mendangkal sungai, yang dapat menyebabkan banjir (Kahfi, 2017:19). Di DKI Jakarta sendiri banjir juga diakibatkan oleh pengelolaan sampah yang tidak baik serta kesadaran masyarakat yang rendah tentang pengelolaan sampah yang benar. Seperti yang dilansir dari tribunjakarta.com dengan menerapkan skema 3R yaitu *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*, masyarakat dapat mulai peduli terhadap sampah. Sehingga mereka juga dapat menjaga lingkungan dengan mengikuti aturan yang akan mencegah banjir di wilayah Jakarta.

Berbagai langkah juga telah diambil oleh pemerintah untuk mengatasi isu sampah, terutama di wilayah perkotaan, namun belum mencapai hasil yang diinginkan karena masyarakat belum terlibat secara aktif. Volume sampah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, karena setiap orang memiliki kemampuan untuk menghasilkan sampah, sementara kapasitas Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani sampah relatif tidak bertambah banyak. Oleh karenanya

diperlukan upaya pengelolaan sampah agar sampah yang dihasilkan tidak menjadi konflik berkepanjangan.

Data lain juga memperlihatkan, bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta jumlah sampah yang diangkut di Jakarta setiap harinya meningkat pada tahun 2022 mencapai 7.543 ton yang sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 7.233 ton per hari.

Tabel 1. 4

Jumlah Volume Sampah yang Terangkut di Provinsi DKI Jakarta (Ton)

Jenis Sampah	Volume Sampah yang Terangkut per Hari Menurut Jenis Sampah di Provinsi DKI Jakarta (Ton)	
	2021	2022
Organik	3.888,19	3.761,90
Anorganik	3.305,20	3.749,84
Bahan Beracun dan Berbahaya	40,44	31,68
Jumlah	7.233,82	7.543,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Untuk mengurangi beban tersebut, pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan strategis, salah satunya melalui penguatan program bank sampah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Nomor 14 Tahun 2021 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun 2021 mengenai Bank Sampah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan sampah dengan berbagai inisiatif, termasuk pembangunan bank sampah serta berkurangnya jumlah sampah yang dikirim ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 30% untuk target pengurangan sampah dan 70% untuk penanganan sampah, adanya target ini juga bersumber dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Jakstranas atau Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah. Untuk melaksanakan Perpres tersebut, pemerintah provinsi DKI Jakarta membuat Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 serta peraturan lainnya seperti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 terkait Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Beberapa peraturan tersebut menggambarkan relevansi kebijakan pengelolaan sampah yang mendasari pelaksanaan program bank sampah.

Bank sampah ialah tempat penyimpanan sampah yang telah dikategorikan berdasarkan jenisnya, di mana sampah tersebut memiliki nilai ekonomis. Selain berperan sebagai pendorong gerakan penghijauan, pengelolaan sampah ini juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran ekonomi untuk masyarakat serta anak-anak (Mahendra et al., 2023:1854). Program bank sampah telah memberikan pengaruh yang positif dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai isu kebersihan serta bertujuan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat umum, dalam upaya mengurangi, memanfaatkan kembali, serta mendaur ulang sampah, yang dikenal sebagai prinsip 3R yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*.

Seperti yang telah dijelaskan juga pada peraturan mengenai Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021. Tujuan dari peraturan ini yaitu untuk meningkatkan fungsi bank sampah dalam pengelolaan limbah secara menyeluruh dan terintegrasi dari awal hingga akhir dengan menggunakan pendekatan ekonomi sirkular. Ini memberikan keuntungan dari segi ekonomi, keamanan lingkungan, serta kesehatan masyarakat. Pada hal ini didalamnya juga melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat.

Dalam penerapan bank sampah, kolaborasi dari berbagai aktor diperlukan bukan hanya dari pemerintah saja seperti masyarakat, non pemerintah, serta sektor swasta. Hal ini untuk memastikan keberhasilan program yang berkelanjutan. Bentuk kolaborasi yang dimaksud dapat digambarkan seperti yang terjadi di wilayah Mendawai, Kota Palangka Raya. Pengelolaan sampah di Mendawai dilakukan dengan pendekatan *Collaborative Governance* yang melibatkan tiga aktor yaitu pemerintah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, sektor swasta diwakili oleh pengelola Bank Sampah Induk atau BSI, dan masyarakat melalui komunitas pengelola sampah bernama Kelola Sampah (Kelas) PKY (Syifa & Mustikaningsih, 2025:27).

Para aktor tersebut memiliki perannya masing masing. Dinas Lingkungan Hidup yang berperan sebagai pembimbing dan mengawasi operasional Bank Sampah Induk (BSI), sektor swasta yaitu BSI Sebagai wadah yang menampung dan mendukung jalannya Kelas PKY, dan masyarakat melalui Kelas PKY yang menjalankan dan mengimplementasikan prinsip prinsip *Collaborative Governance* di lapangan. Hubungan antaraktor tersebut berfungsi sebagai sistem yang saling mendukung, di mana pemerintah menyediakan kerangka kebijakan dan fasilitas, sektor swasta memberdayakan ekonomi dari pengelolaan sampah, dan masyarakat menjalankan aksi langsung dalam pengelolaan dan edukasi, sehingga menciptakan pengelolaan sampah yang efektif serta berkesinambungan.

Keberhasilan dan keberlanjutan bank sampah sangat bergantung pada kolaborasi aktif dari semua aktor yang terlibat, serta pengembangan strategi, jejaring sosial, dan sosialisasi yang konsisten (Siagian, et.al., 2019:71). Pada bank sampah di Kota Medan terlihat bahwa kolaborasi para aktor sangat berperan dalam mempertahankan keberlanjutan operasional bank sampah. Aktor yang terlibat diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, nasabah, bank sampah induk dan unit, perusahaan atau vendor, serta pengepul. Keberlanjutan tersebut didukung oleh tiga unsur utama yang dimiliki aktor yaitu strategi yang berupa gagasan, kreativitas, serta tekad yang keras, kedua yaitu jaringan sosial melalui pembentukan kerjasama dan jejaring, dan terakhir yaitu sosialisasi pengelolaan sampah meliputi pendidikan dan penyadaran masyarakat. Adanya aspek tersebut sangat penting karena mampu memperkuat keberlangsungan dan pengembangan bank sampah, sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat pada pengelolaan sampah.

Pada implementasi nya program bank sampah juga masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu partisipasi rendah dari masyarakat sebagai nasabah, keterbatasan dalam pengolahan sampah anorganik menjadi hasil kerajinan, serta persaingan harga dengan pedagang barang bekas (Wahyuningwidi & Irdyanti, 2023). Permasalahan sampah tidak hanya terbatas pada aspek produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidaktahuan masyarakat dalam membedakan jenis sampah organik dan anorganik. Selain itu ditemukan juga bahwa sebagian masyarakat masih belum terbiasa memilah sampah di rumah. Pandangan bahwa pemisahan sampah tidak menghasilkan manfaat yang signifikan serta perasaan bahwa hal itu

merepotkan menjadi alasan kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam inisiatif pengelolaan sampah (Wahyudin & Susetyo, 2024:316).

Seperti yang telah diuraikan, keberlanjutan bank sampah sangat bergantung pada keterlibatan berbagai aktor termasuk partisipasi dari masyarakat yang memainkan peranan sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di Kelurahan Kotabaru Kota Yogyakarta, masih menghadapi berbagai tantangan yaitu tingkat kesadaran yang rendah tentang pentingnya manajemen sampah. Fenomena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program bank sampah ini menunjukkan masih kurangnya sosialisasi serta edukasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan program bank sampah. Sasoko (2024:112) menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam kelangsungan program bank sampah. Melalui penyuluhan tersebut, masyarakat menerima pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai urgensi pengelolaan sampah, nilai positif dari inisiatif bank sampah, serta cara mereka untuk dapat berkontribusi aktif dalam program tersebut.

Serupa dengan yang disampaikan oleh Setiawandari & Kriswibowo (2023:150) dalam pelaksanaan kolaborasi yang terjalin pada pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu atau TPST SAMTAKU (Sampah Tanggung Jawabku) di Kabupaten Lamongan belum terlaksana dengan baik sepenuhnya karena terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat. Permasalahan tersebut diantaranya kurangnya infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah, masih minimnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya edukasi atau keterampilan dalam mengelola sampah yang benar dan efektif. Dalam hal ini pihak swasta yaitu PT. Reciki Solusi yang bergerak di bidang pengelolaan sampah memberikan bantuan berupa sarana dan prasana, dan Dompot Dhuafa sebagai edukator.

Kesadaran masyarakat yang tidak ada serta perhatian dari pemerintah yang masih kurang dalam mengolah sampah juga menjadi permasalahan yang terjadi di Bank Sampah Indria Jaya, Kota Semarang. Permasalahan tersebut yang menjadi awal terjalinnya kolaborasi dengan berbagai aktor yaitu Dinas Lingkungan Hidup

Kota Semarang, Kelurahan Kalipancur, PT. Indofood sebagai pihak swasta, Yayasan Bintari Foundation sebagai lembaga CSR yang berfokus pada sektor lingkungan, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang dibangun dapat memberikan dampak yang menyeluruh serta hasil yang lebih optimal (Gimnastiar, et.al., 2023:451).

Selain itu, penelitian ini juga penting dilakukan untuk mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGS) terutama tujuan terkait kota dan pemukiman yang berkelanjutan yaitu SDGS poin 11 dan 12 mengenai konsumsi serta produksi yang bertanggung jawab. Yang dimana poin 11 mencakup mengenai mewujudkan kota serta pemukiman yang aman, bersih, dan berkelanjutan. Dengan target nya yaitu menjamin akses yang merata dan aman bagi semua orang terhadap lingkungan serta fasilitas dasar di wilayah perkotaan, meliputi perumahan yang layak, sanitasi, pengelolaan sampah, dan sistem transportasi yang ramah lingkungan dengan emisi karbon rendah.

Pada poin ke 12 yaitu memastikan produksi yang berkelanjutan dengan berfokus pada penggunaan sumber daya yang efisien, mengurangi limbah serta mendorong praktik yang ramah lingkungan. Dengan target di tahun 2030, secara signifikan menekan volume produksi limbah melalui strategi penanggulangan, pengurangan, daur ulang, dan pemanfaatan ulang. Hal tersebut yang mendasari hubungannya dengan program bank sampah. Dengan adanya program tersebut juga dapat mendukung tujuan dari pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu agenda dari *United Nations* atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang didalamnya terdapat 17 poin pembangunan berkelanjutan agar di tahun 2030 nanti semua orang masih bisa merasakan kehidupan seperti sekarang. Prinsip dari SDGS yaitu *No One Left Behind* atau tidak ada satupun yang terlewatkan (*Sustainable Development Goals*, n.d.).

Bank sampah dapat dirincikan kembali menjadi dua yaitu Bank Sampah Induk atau BSI serta Bank Sampah Unit atau BSU. BSI berada di tingkat kota atau kabupaten dan bertanggung jawab untuk menampung sampah yang sudah dipisahkan oleh BSU. Sementara BSU merupakan bank sampah yang berada di level RT, RW, ataupun komunitas yang berperan dalam memilah serta

mengumpulkan sampah yang sudah diberikan dari masyarakat. Berdasarkan data yang diakses dari *website* Dashboard Informasi Eksekutif (DoE) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sudah terdapat lima BSI yang masing-masingnya tersebar di berbagai wilayah kota administrasi DKI Jakarta diantaranya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Serta dengan lebih dari 2.000 BSU yang tersebar di berbagai wilayah.

Penelitian ini juga berangkat dari adanya fenomena yang terjadi di lapangan yaitu masih terdapat kendala dalam penerapan bank sampah yang menghambat keefektifan dari program tersebut seperti terbatasnya fasilitas atau sarana dan prasarana, kurangnya dukungan yang diberikan baik dalam bentuk anggaran maupun pembinaan, dan kerjasama antar aktor yang belum terstruktur. Berdasarkan pengamatan sementara peneliti di lapangan juga ditemukan bahwa beberapa bank sampah sudah berjalan dan diterapkan sebagai bagian dari penerapan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah.

Ditemukan juga bahwa dalam penerapan program bank sampah ini keberlanjutan menjadi unsur penting dikarenakan terdapat bank sampah yang semula operasionalnya berjalan lalu menjadi tidak aktif. Beberapa penyebabnya diantaranya pada aspek sumber daya manusia, ketika salah satu pengurus tidak dapat menjalankan tugasnya maka operasional bank sampah menjadi terhambat. Keterbatasan mitra kerjasama untuk penjualan hasil pemilahan sampah juga menjadi hambatan. Dari aspek sarana dan prasarana juga menjadi hambatan seperti tidak memadainya tempat untuk melakukan kegiatan bank sampah, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam melakukan pemilahan sampah. Dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa antara kebijakan yang telah dibuat terdapat kesenjangan dengan penerapannya di lapangan. Hal tersebut juga menegaskan bahwa program bank sampah tidak dapat berjalan sendiri dibutuhkannya kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah melalui program bank sampah.

Program bank sampah dapat berjalan secara optimal apabila terdapat kolaborasi sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, di mana ketiga aktor ini memainkan peran penting dalam menjalankan kebijakan yang telah

dirumuskan secara kolektif. Kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, serta perusahaan swasta memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan sistem pengelolaan bank sampah yang efektif. Kolaborasi tersebut disebut juga sebagai *collaborative governance*. Perlunya prinsip *collaborative governance* diterapkan dalam implementasi program bank sampah ini karena sampah merupakan tanggung jawab bersama dan agar implementasi bank sampah dapat berjalan secara optimal serta berkelanjutan.

Dipilihnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai lokus penelitian karena wilayah ini merupakan salah satu kota administrasi yang menghasilkan jumlah volume timbulan sampah terbanyak di DKI Jakarta. Jumlah penduduk yang meningkat di Kota Administrasi Jakarta Timur juga menjadi salah satu faktor penyebab masalah sampah dan faktor lainnya seperti beragamnya kondisi sosial ekonomi masyarakat di perkotaan, masih kurangnya komitmen pemerintah serta masyarakat dalam menangani ataupun mengelola sampah. Berikut merupakan jumlah sampah yang dihasilkan berdasarkan Kabupaten/Kota.

Tabel 1. 5

Jumlah Timbulan Sampah Berdasarkan Kabupaten/Kota

Tahun	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah Harian (ton)	Jumlah Sampah Tahunan (ton)
2025	DKI Jakarta	Kabupaten Adm. Kep. Seribu	18,16	6.627,9
2025	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	858,09	313.203,39
2025	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	1.711,55	624.714,06
2025	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	2.213,61	807.966,6
2025	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	2.005,43	731.982,61
2025	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	2.374,14	866.562,58
Total Timbulan			9.181	3.351.057,14

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Dari keseluruhan wilayah, Kota Administrasi Jakarta Timur mencatat timbulan sampah tertinggi dengan angka 866.562,58 ton per tahun, diikuti oleh Kota Jakarta Barat sebanyak 807.966,6 ton, dan Jakarta Selatan sebanyak 731.982,61 ton. Sementara itu, Jakarta Utara menghasilkan 624.714,06 ton, dan Jakarta Pusat menyumbang 313.203,39 ton. Adapun Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan jumlah sampah terendah, yaitu hanya 6.627,9 ton per tahun, atau sekitar 18.16 ton per hari. Kota Jakarta Timur juga menjadi penyumbang harian terbanyak dengan 2.374,14 ton, menunjukkan korelasi yang kuat antara jumlah penduduk dan aktivitas wilayah terhadap volume timbulan sampah.

Permasalahan sampah di Jakarta Timur yang semakin kompleks ini diperlukan inovasi pengelolaan sampah yang tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai aktor secara kolaboratif. Untuk mengatasi permasalahan sampah secara mendasar dari akar penyebabnya, diperlukan kolaborasi *multi-stakeholder* dalam kerangka pengelolaan sampah berbasis komunitas, yang salah satu penerapannya terwujud melalui program bank sampah (Hertati & Arif, 2022:2). Kolaborasi antar pemangku kepentingan ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi pelaksanaan program bank sampah berjalan dengan optimal.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, hal tersebut menjadi penting diteliti untuk menganalisis aspek kolaborasi dalam penerapan bank sampah untuk mendukung keberlanjutan bank sampah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “*collaborative governance* dalam implementasi program bank sampah untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah di kota administrasi jakarta timur.”

1.2 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan jelas ruang lingkupnya maka ditetapkan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Pembatasan penelitian difokuskan pada proses *collaborative governance* dalam penerapan program bank sampah pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai wilayah dengan jumlah timbulan sampah terbanyak

di DKI Jakarta serta dilakukan pada bank sampah dengan kondisi yang berbeda.

2. Pada penelitian ini aktor yang dikaji terbatas pada pemerintah, pelaksana program bank sampah, serta masyarakat sebagai nasabah.
3. Analisis pada penelitian ini difokuskan pada proses kolaborasi yang mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah melalui program bank sampah berdasarkan dengan teori yang digunakan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pada penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana proses *collaborative governance* dalam implementasi program bank sampah untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam implementasi program bank sampah untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta tujuan penelitian yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta dapat diterapkan serta bekerjasama secara efektif pada program bank sampah untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang penerapan teori *collaborative governance* pada program bank sampah.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan serta rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait termasuk para instansi pemerintahan yang dalam hal ini yaitu Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur dalam meningkatkan efektivitas serta kolaborasi antar aktor pada program bank sampah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan pada penelitian ini, penulis akan menjabarkan sistematika penulisan yang terbagi menjadi beberapa bagian dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan penjelasan secara garis besar yang berkaitan dengan latar belakang, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian terkait dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu *collaborative governance* dalam penerapan program bank sampah untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah di kota administrasi Jakarta Timur.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi data penelitian. Selain itu, penulis juga memaparkan mengenai konsep dan teori yang digunakan serta kerangka pemikiran atau alur pemikiran peneliti dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan atau cara untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, seperti pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi serta waktu penelitian, bagaimana teknik pengumpulan datanya, sumber data yang digunakan, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil serta pembahasan dari data-data yang sudah dikumpulkan dan dianalisa yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, pembahasan pada bab ini juga akan diselaraskan dengan teori yang digunakan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah diteliti serta saran yang dapat diberikan baik untuk pihak pihak terkait maupun penyelenggara kebijakan untuk perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA:

Pada bab ini berisikan sumber sumber yang dijadikan referensi baik itu dari jurnal, website, maupun peraturan perundang-undangan untuk memperoleh data serta membangun penelitian ini.

LAMPIRAN:

Pada bagian ini berisikan pedoman wawancara beserta transkripnya, dokumentasi, dan dokumen dokumen pendukung lainnya dalam melakukan penelitian ini.

